

RENCANA KERJA

2026

KOTA BLITAR



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Standar Pelayanan Minimal* maka dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja akan diarahkan untuk mewujudkan amanat dari peraturan tersebut tetapi tetap berdasarkan prinsip kesesuaian, kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten / kota terdiri atas :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Ada 3 peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut khususnya untuk urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang *Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang *Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub*

Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD;
2. Rumusan program / kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing Perangkat Daerah;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n + 1$;
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
5. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengutamakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Ranwal Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2026 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2026.

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berarti harus ada kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rencana Awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2026 juga berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

Renja Kementerian/lembaga (Renja Kementrian Dalam Negeri Bina Administrasi Kewilayahan) dan Renja Provinsi (Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Kementerian Dalam Negeri Bina Administrasi Kewilayahn dan Renja Satpol PP Provinsi Jatim perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2026.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2026. Sedangkan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2026 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
 24. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor ...);
 - 25.
 26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2026 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan
- BAB II** Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- BAB III** Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan
- BAB IV** Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisikan uraian garis besar mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2026.
- BAB V** Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian anantara program dengan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Blitar tahun lalu (2024) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2025) dengan mengacu pada APBD tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2024 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2025 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat dalam **Tabel 2.1** sebagai berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05				Urusan Pemerintahan									
					Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
					Tujuan 1 : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10,41%	3,94%	5,92%	6,76%	114,19%	8,06%	8,06%	77,42%
					Sasaran 1 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban	14,64%	6,53%	8,68%	8,83%	101,73%	11,4%	11,4%	77,87%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						umum								
1	05	02			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	99,39%	96,15%	96,89%	97,99%	101,13%	98,14%	98,14%	98,74%
						Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	99,04%	95.17%	96,39%	96,92%	100,55%	97,71%	97,71%	98,66%
1	05	02	2.01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum		60%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	100%
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan								
1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 laporan	100%
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	36 dokumen	100%
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan	Jumlah Dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum								
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	135 orang	45 orang	45 orang	45 orang	100%	45 orang	135 orang	100%
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuak dan Dimutakhirkan	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	33,33%
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan	Jumlah laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	-	2 laporan	66,66%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Peraturan Daerah dan Perkada	dan Perkada yang Terlayani dan jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani								
1	05	02	2.02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	02	2.02	010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%
1	05	02	2.02	012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kepala Daerah	Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
1	05	02	2.02	011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	100%
1	05	02	2.03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	02	2.03		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	6 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	4 laporan	66,66%
					Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65	0,43	0,60	0,47	78,33%	0,62	0,62	95,38%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	94%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	106,38%
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.01		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	100%
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	36 dokumen	100%
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	63 unit	10 unit	23 unit	23 unit	100%	8 unit	41 unit	65,08%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	36 orang	-	12 orang	12 orang	100%	12 orang	24 orang	66,66%
1	05	04	2.02		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.02		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	100%
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi	Jumlah Dokumen yang Memuat	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kebakaran	Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								
1	05	04	2.04		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	60%	20%	20%	20%	100%	20%	60%	100%
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	420 orang	280 orang	140 orang	140 orang	100%	70 orang	490 orang	116,66%
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan	Jumlah	7 desa/ kelurahan	-	7 desa/ kelurahan	21 desa/keluraha	300%	21 desa/keluraha	21 desa/kelurahan	300%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingku ngan (SKKL) Setiap Tahunnya				n		n		
					Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,41) nilai	A (81,30) Nilai	A (85,35)					
					Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,41) nilai	A (81,30) Nilai	A (85,35)	A (84,85)	99,41%	A (85,37)	A (85,37)	99,95%
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,25 indeks	83,50 Indeks	81,75 indeks	84,66 indeks	103,56%	82 indeks	82 indeks	99,69%
1	05	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perangkat Daerah	pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar								
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	30 dokumen	100%
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	21 laporan	100%
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	44 orang	45 orang	45 orang	100%	45 orang	45 orang	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 laporan	100%
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket	7 paket	7 paket	7 paket	100%	4 paket	18 paket	85,71%
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	135 orang	45 orang	45 orang	45 orang	100%	45 orang	135 orang	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	100%
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	5 paket	3 paket	3 paket	100%	4 paket	12 paket	92,30%
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100%	6 paket	16 paket	106,66%
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	36 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	1 paket	25 paket	69,44%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/Sub Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Disediakan								
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	1 paket	25 paket	69,44%
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	100%
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138 laporan	46 laporan	46 laporan	46 laporan	100%	12 laporan	104 laporan	75,36%
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan	Jumlah Unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	-	1 unit	1 unit	100%	6 unit	7 unit	140%
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	6 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	24 unit	200%
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	-	-	-	-	-	-	-
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100%	12 laporan	60 laporan	62,5%
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100%	12 laporan	60 laporan	62,5%
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	33 unit	33 unit	110%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Operasional atau Lapangan									
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	1 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	11 unit	73,33%
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	5 unit	9 unit	9 unit	100%	29 unit	29 unit	107,40%
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	1 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	5 unit	71,42%
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	3 unit	-	-	-	-	-	-	-

Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2024 tidak ada / NIHIL.

Program dan Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE KETERCAPIAN
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	100%	100%
Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	100%	100%	100%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%
Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	100%	100%
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	20%	20%	100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%

Adapun faktor – faktor yang menjadi pendukung tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
2. Target yang telah direncanakan sudah tepat.

Adapun Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE KETERCAPAIAN
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			
- Persentase gangguan transtibum yang diselesaikan	96,89%	97,99%	101,13%
- Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	96,39%	96,92%	100,55%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	81,75 indeks	84,66 Indeks	103,56%

Faktor-faktor yang menjadi pendukung realisasi melebihi target adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perencanaan penentuan target yang cukup baik.
- b. Ketaatan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan.
- c. Kerja sama lintas bidang dan koordinasi lintas perangkat daerah yang baik.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi atau melebihi target sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, tahun 2024 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Hal ini mencerminkan adanya perencanaan yang cukup baik, dukungan koordinasi lintas perangkat daerah yang optimal, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja berbasis kinerja (performance-based planning), seperti mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja ke dalam dokumen perencanaan.
- 2) Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah
- 3) Pengembangan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat, kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di dalam mengamankan program – program pemerintah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah sangat diperlukan. Meskipun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan klasik seperti opini masyarakat yang negatif, sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan pemberitaan dari media massa yang tidak berimbang. Sebagai aparatur pemerintah yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi persoalan yang rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti halnya pada waktu penertiban, petugas berhadapan dengan pelanggar yang menolak untuk ditertibkan akibatnya petugas sering dihadapkan dengan tindakan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. Hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan ketentraman masyarakat.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat yang sasaran akhirnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat ditunjukkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

NO	Indikator	IKU/IKK/ SPM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	IKU	4,39%	6,40%	8,68%	11,40%	4,36%	6,53%	8,83%	11,40%	14,64%	-	Realisasi tahun 2024 diatas target
2.	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	IKU	100%	91%	100%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi tahun 2024 diatas target
3.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	IKK	94,38%	95,64%	96,89%	98,14%	93,59 %	96,15%	97,99%	98,14%	99,39%	100%	Realisasi tahun 2024 diatas target
4.	Persentase Pelanggaran Perda yang diselesaikan	IKK	93.74%	95.06%	96.39%	97.71%	94,20%	95,17%	96,89%	97.71%	99,04	100%	Realisasi tahun 2024 diatas target

NO	Indikator	IKU/IKK/ SPM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
5.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi tahun 2024 sesuai target
6.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	IKK	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	13,13 menit	10,91 menit	10,47 menit	10,47 menit	10 menit	10 menit	Realisasi tahun 2024 diatas target
7.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi tahun 2024 sesuai target
8.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi tahun 2024 sesuai target

Dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung **Misi ke 1** “Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis“, **Tujuan ke 2** “Terwujudnya Jaminan Rasa Aman pada Masyarakat“, **Sasaran ke 1** “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban”. Apabila target kinerja tidak tercapai maka indikator kinerja daerah tidak tercapai, karena pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota Blitar. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh elemen Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Masih tingginya angka pelanggaran perda dan perkara di Kota Blitar;
- ❖ Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Blitar;
- ❖ Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal;

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Keterbatasan jumlah PPNS Penegak Perda yang memiliki sertifikasi ;
- ❖ Belum optimalnya kualitas SDM aparatur penegak perda;
- ❖ Belum optimalnya kualitas SDM aparatur dan relawan pemadam kebakaran;
- ❖ Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan baik kuantitas maupun kualitasnya .

b. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan ;
- ❖ Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna ;
- ❖ Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal ;
- ❖ Dinamika masyarakat yang semakin kompleks ;
- ❖ Penegakan peraturan daerah terkait dengan pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang yang masih berpotensi menimbulkan konflik sosial horisontal ;
- ❖ Adanya interpretasi yang berbeda terhadap penegakan Perda ;
- ❖ Koordinasi antara Perangkat Daerah terkait belum berjalan secara optimal .

Adapun peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ❖ Kewenangan dan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang semakin kuat dan luas dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- ❖ Kepercayaan masyarakat yang mulai muncul terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum ;
- ❖ Keberadaan anggota perlindungan masyarakat (linmas) yang dapat diberdayakan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan tempat tinggalnya ;
- ❖ Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang *Penerapan Standar*

Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis yang dimaksud antara lain :

1. Masih tingginya angka pelanggaran perda di Kota Blitar
2. Sanksi yang tertuang di dalam pasal Perda belum dapat ditegakkan secara paripurna
3. Potensi kerawanan ketertiban umum semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan mengakibatkan masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Koordinasi dan sinkronisasi antar OPD belum optimal
5. Adanya standar teknis mutu pelayanan dasar sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota* yang belum terpenuhi.

Terkait dengan isu – isu strategis di atas, hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Dalam penegakan perda dan perkara direncanakan dengan baik dan pelaksanaan kegiatan lebih taat jadwal .

2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda dan Perkada yang berlaku.
3. Menambah volume kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban umum agar bisa menjangkau seluruh wilayah Kota Blitar.
4. Mengoptimalkan koordinasi antara perangkat daerah .
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat melalui kegiatan – kegiatan yang melibatkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat melalui pembentukan Satgas Linmas.
7. Mengoptimalkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 *tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 *tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota*

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka mendukung visi Kota Blitar sebagai kota yang *cerdas, inklusif, maju, dan berkelanjutan* sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029, telah dirancang tahapan pembangunan jangka pendek sebagai dasar penyusunan RKPD pada periode tersebut. Untuk tahun 2026, tema pembangunan yang diusung adalah “Penguatan Fondasi Transformasi dalam Pelayanan Dasar melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Berkelanjutan”.

Program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan, dengan tujuan

untuk merumuskan program-program perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Pelaksanaan program ini dijalankan melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam urusan penyelenggaraan pembangunan. Dengan demikian, program prioritas daerah tidak hanya menjadi arah pembangunan, tetapi juga menjadi acuan utama dalam penyusunan program kerja masing-masing perangkat daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam mengawal implementasi kebijakan kepala daerah. Tugas pokok Satpol PP yaitu menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat, secara langsung mendukung janji politik Walikota sebagai berikut :

1. Janji poliik kampanye “Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya dengan mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural” dilaksanakan pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
2. Janji politik kampanye “Menanamkan mindset dan meningkatkan kapasitas SDM dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis pada pelayanan masyarakat yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan inovasi dalam pelayanan dengan memanfaatkan teknologi yang terintegrasi” dilaksanakan pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Dalam rangka meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Blitar, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan salah satu

prioritas pembangunan daerah yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang telah di tetapkan sebagaimana dalam ***Tabel 2.3*** sebagai berikut.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Blitar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Satuan Polisi Pamong Praja				11.043.585.164,00						
	Urusan Pemerintahan				11.043.585.164,00						
	Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				11.043.585.164,00						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	84 nilai	7.126.917.523,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	84 nilai	7.943.823.328,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	6.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	11.046.200,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	1.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	1.623.600,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan	1.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan	2.278.000,00	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Blitar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Blitar	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat	1 Data	894.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Daerah			
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.000.000,00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	3.900.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen	1.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	13 Dokumen	1.100.000,00	
	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	1.000.000,00	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	1.250.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	6.697.760.762,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	6.697.760.762,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	59 orang / bulan	6.696.700.262,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	59 orang / bulan	6.696.700.262,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	4 laporan	1.060.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi	4 laporan	1.060.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			bulanan/triwulanan/semesteran SKPD					penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100%	500.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100%	1.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	500.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	1.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	100%	9.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	100%	148.549.800,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	7.500.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	7 paket	98.614.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	60 orang	2.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	60 orang	49.935.800,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	108.789.151,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	158.620.966,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.988.800,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	24.001.666,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 paket	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 paket	10.545.900,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 paket	5.278.151,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 paket	20.700.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	3.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	8.882.600,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	1 dokumen	5.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	1 dokumen	5.508.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	74.111.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	77.994.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	15.874.500,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	167.468.500,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	15.874.500,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	167.468.500,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	194.053.210,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	259.518.700,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang	12 laporan	50.729.810,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	12 laporan	107.899.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			disediakan					daya air dan listrik yang disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	143.323.400,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	151.619.200,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	95.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	499.858.400,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	33 unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	33 unit	239.136.900,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	15.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	20.721.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	240.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Blitar	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100%	3.726.772.141,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Blitar	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100%	4.331.331.764,00	
		Kota Blitar	PP Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	68,18%			Kota Blitar	PP Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	68,18%		
		Kota Blitar	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	82,88%			Kota Blitar	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	82,88%		
	Penanganan Gangguan	Kota	Persentase gangguan	100%	2.833.470.081,00	Penanganan	Kota	Persentase gangguan	100%	3.251.935.100,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Blitar	ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditangani			Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Blitar	ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditangani			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	21.258.900,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	21.258.800,00	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	80.000.000,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	159.765.000,00	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	55 orang	60.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	55 orang	63.704.100,00	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	2.587.744.081,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	2.922.742.700,00	
	Penindakan Atas	Kota	Jumlah Laporan Gangguan	12	24.467.100,00	Penindakan Atas	Kota	Jumlah Laporan	12	24.466.300,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Blitar	Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	laporan		Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Blitar	Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	laporan		
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi	Kota Blitar	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	45 orang	60.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi	Kota Blitar	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	45 orang	59.998.200,00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Persentase layanan penegakan Perda dan Perkada sesuai standar	100%	887.302.060,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Blitar	Persentase layanan penegakan Perda dan Perkada sesuai standar	100%	1.073.396.664,00	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	350.000.000,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	427.121.478,00	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 laporan	524.838.260,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 laporan	633.811.386,00	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	12 laporan	12.463.800,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap	12 laporan	12.463.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Daerah		Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	100%	6.000.000,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	100%	6.000.000,00	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	6.000.000,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 laporan	6.000.000,00	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Blitar	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	189.895.500,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Blitar	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	516.538.700,00	
			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100%				Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100%		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	95.895.500,00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	176.896.542,00	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	43.895.500,00	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	43.895.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Setiap Tahunnya			
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	5.000.000,00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	7.072.500,00	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 dokumen	7.000.000,00	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 dokumen	8.566.700,00	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	12 orang	25.000.000,00	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	12 orang	92.795.300,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 unit	15.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 unit	24.566.542,00	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	34.000.000,00	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	82.497.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	25.000.000,00	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	73.441.800,00	
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	9.000.000,00	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	9.055.700,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Blitar	Persentase pemenuhan relawan kebakaran sesuai standar	100%	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Blitar	Persentase pemenuhan relawan kebakaran sesuai standar	100%	66.022.700,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 orang	20.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 orang	20.822.100,00	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	21 desa / kelurahan	40.000.000,00	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Blitar	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	21 desa / kelurahan	45.200.600,00	

Dari tabel 3.1. tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Rancangan Awal dan Hasil Analisis Kebutuhan terdapat perubahan pagu beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan di lapangan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan ada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas usulan kegiatan pembangunan pada tahun 2026. Sebagian usulan tersebut sudah diakomodir dalam rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2026, tetapi besaran anggaran disesuaikan dengan kemampuan OPD. Usulan kegiatan dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam **Tabel 2.4** berikut .

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Blitar

No	Usulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan mengusung tema "**Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**". Fokus arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun tersebut mengedepankan pendekatan transformasi berbasis hasil, yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, tata kelola berbasis digital, serta peningkatan kolaborasi antar sektor. Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam penegakan Perda Perkada Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam memastikan keselarasan dan integrasi perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Satpol PP perlu mendorong terwujudnya sinkronisasi, sinergi, dan harmonisasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026, agar sejalan dengan arah prioritas pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar di tahun 2026 sebagaimana dalam **Tabel 3.1** di bawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar Tahun 2026-2027

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks Ketentraman dan Ketertiban adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan, kedamaian, dan keteraturan dalam suatu wilayah atau masyarakat	98,52	-	99,1	99,4
2.	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan tindakan pelanggaran masyarakat terhadap aturan perda dan perkada terkait dengan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang memuat sanksi.	390	-	360	345
		Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum merupakan semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi terganggunya ketentraman dan ketertiban umum	1394	-	1250	1120
3.	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Frekuensi kejadian kebakaran	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang	36	-	30	28

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Realisasi		Target	
				2024	2025	2026	2027
			menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.. Tingkat waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran.				
4.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun berkenaan	84.85	-	85.39	85.4

3.3 Program dan Kegiatan

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2026 adalah 3 program, 14 kegiatan, dan 44 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.600.571.834,00. Selanjutnya, program, kegiatan dan sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana **Tabel 3.2** berikut :

Tabel 3.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
1	05				Urusan Pemerintahan		
					Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
					Tujuan 1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	
					Sasaran 1 : Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	
						Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	
1	05	02			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	
						Persentase cakupan perlindungan masyarakat	
1	05	02	2.01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditangani	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	Mendukung Pencapaian SPM

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
						Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Mendukung Pencapaian SPM
1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Mendukung Pencapaian SPM
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Mendukung Pencapaian SPM
1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Mendukung Pencapaian SPM
1	05	02	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Mendukung Pencapaian SPM
1	05	02	2.02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase layanan penegakan Perda dan Perkada sesuai standar	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	Mendukung Pencapaian SPM
1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Mendukung Pencapaian SPM
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Mendukung Pencapaian SPM

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
1	05	02	2.03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Mendukung Pencapaian SPM
					Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Frekuensi kejadian kebakaran	
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
						Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	
1	05	04	2.01		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	Mendukung Pencapaian SPM
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung Pencapaian SPM
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Mendukung Pencapaian SPM
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Mendukung Pencapaian SPM

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Mendukung Pencapaian SPM
1	05	04	2.02		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Mendukung Pencapaian SPM
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Mendukung Pencapaian SPM
1	05	04	2.04		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemenuhan relawan kebakaran sesuai standar	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Mendukung Pencapaian SPM
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Mendukung Pencapaian SPM
					Sasaran 3 :	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
					Meningkatnya kinerja perangkat daerah		
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	
1	05	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Mendukung Peningkatan tata kelola

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1					2	3	
						Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mendukung Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan tahun 2026 dan pagu indikatif tahun 2026 secara keseluruhan. Perumusan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, evaluasi capaian kinerja, permasalahan, isu strategis, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

4.1. Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2024 pada Renja Perangkat Dearah Tahun 2026

Untuk mendukung pencapaian sasaran, selanjutnya dirumuskan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2026. Program dan kegiatan prioritas tersebut diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2026 serta mendukung terwujudnya target capaian nasional, provinsi dan daerah.

Tabel. 4.1. Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2024 pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Lebih mengintensifkan patroli gabungan dengan instansi terkait di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Melaksanakan patroli gabungan dengan instansi terkait di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
2.	Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat pemadam kebakaran	Melaksanakan pembinaan dan pelatihan ketrampilan teknis kepada aparatur pemadam kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
3.	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
4.	Peningkatan pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana melalui sosialisasi.	Melaksanakan sosialisasi dan penekanan tugas dari Kepala kepada seluruh ASN yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2026

Rencana kerja dan pendanaan mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan baik prioritas perangkat daerah maupun operasional yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, kegiatan, dan sub kegiatan PD Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Blitar

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				12,600,571,834.00				11,227,060,500.00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12,600,571,834.00				11,227,060,500.00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12,600,571,834.00				11,227,060,500.00
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku		84 %	7,943,823,328.00			84 %	7,353,225,870.00
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan		100 %	11,046,200.00			100 %	7,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar							
1.05.0 1.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	4 Dokumen	1,623,600.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	1,000,000.00
1.05.0 1.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	9 Laporan	2,278,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Laporan	1,000,000.00
1.05.0 1.2.01 .0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kota Blitar	1 Data	894,600.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Data	1,000,000.00
1.05.0 1.2.01 .0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	1 Berita Acara	3,900,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Berita Acara	2,000,000.00
1.05.0 1.2.01 .0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kota Blitar	13 Dokumen	1,100,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Dokumen	1,000,000.00
1.05.0 1.2.01	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan	Kota Blitar	1 Berita Acara	1,250,000.00	DANA ALOKASI		1 Berita Acara	1,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.0013	Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				UMUM (DAU)			
1.05.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	6,697,760,762.00			100 %	6,779,845,760.00
1.05.0 1.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	59 Orang/bulan	6,696,700,262.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		59 Orang/bulan	6,779,345,760.00
1.05.0 1.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	4 Laporan	1,060,500.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	500,000.00
1.05.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar		100 %	1,000,000.00			100 %	500,000.00
1.05.0 1.2.03 .0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar	4 Laporan	1,000,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	148,549,800.00			100 %	74,952,000.00
1.05.0 1.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar	1 Paket	98,614,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Paket	44,952,000.00
1.05.0 1.2.05 .0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	60 Orang	49,935,800.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45 Orang	30,000,000.00
1.05.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	158,620,966.00			100 %	196,000,000.00
1.05.0 1.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	1 Paket	9,988,800.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	5,000,000.00
1.05.0 1.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	4 Paket	24,001,666.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	10,000,000.00
1.05.0 1.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar	6 Paket	10,545,900.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Paket	5,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.0 1.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	1 Paket	20,700,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	13,000,000.00
1.05.0 1.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar	1 Paket	8,882,600.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	3,000,000.00
1.05.0 1.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar	1 Dokumen	5,508,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	54,000,000.00
1.05.0 1.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	12 Laporan	77,994,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	105,000,000.00
1.05.0 1.2.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	1 Dokumen	1,000,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	1,000,000.00
1.05.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	167,468,500.00			100 %	15,874,900.00
1.05.0 1.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar	8 Unit	167,468,500.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	15,874,900.00
1.05.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan		100 %	259,518,700.00			100 %	194,053,210.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintahan Daerah	sesuai standar							
1.05.0 1.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar	12 Laporan	107,899,500.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	50,729,810.00
1.05.0 1.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	12 Laporan	151,619,200.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	143,323,400.00
1.05.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100 %	499,858,400.00			100 %	85,000,000.00
1.05.0 1.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar	33 Unit	239,136,900.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		33 Unit	65,000,000.00
1.05.0 1.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar	30 Unit	20,721,500.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17 Unit	10,000,000.00
1.05.0 1.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar	2 Unit	240,000,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 Unit	10,000,000.00
1.05.0	PROGRAM	Persentase		100 %	4,331,331,764.00			100 %	3,667,305,041.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) Persentase cakupan perlindungan masyarakat		68,18 % 82,88 %				100 % 100 % 100 %	
1.05.0 2.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditangani		100 %	3,251,935,100.00			100 %	2,849,002,981.00
1.05.0 2.2.01 .0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	12 Dokumen	21,258,800.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	21,258,900.00
1.05.0 2.2.01 .0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Blitar	1 Dokumen	159,765,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	140,000,000.00
1.05.0	Peningkatan Kapasitas	Jumlah SDM Satuan	Kota	55 Orang	63,704,100.00	DANA		55	60,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.01.0013	SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Blitar			ALOKASI UMUM (DAU)		Orang	
1.05.0 2.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Blitar	12 laporan	2,922,742,700.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 laporan	2,587,744,081.00
1.05.0 2.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Blitar	12 Laporan	24,466,300.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	20,000,000.00
1.05.0 2.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Kota Blitar	45 Orang	59,998,200.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45 Orang	20,000,000.00
1.05.0 2.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan	Persentase layanan penegakan Perda dan Perkada sesuai standar		100 %	1,073,396,664.00			100 %	812,302,060.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bupati/Wali Kota								
1.05.0 2.2.02 .0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar	1 Laporan	427,121,478.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)		1 Laporan	325,000,000.00
1.05.0 2.2.02 .0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kota Blitar	12 Laporan	633,811,386.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)		12 Laporan	474,838,260.00
1.05.0 2.2.02 .0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Blitar	12 Laporan	12,463,800.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	12,463,800.00
1.05.0 2.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya		100 %	6,000,000.00			100 %	6,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.0 2.2.03 .0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kota Blitar	1 Laporan	6,000,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	6,000,000.00
1.05.0 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran		100 %	325,416,742.00			100 %	206,529,589.00
1.05.0 4.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		140 Orang	176,896,542.00			160 Orang	97,529,589.00
1.05.0 4.2.01 .0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulanga n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kota Blitar	1 Dokume n	43,895,500.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokume n	30,895,500.00
1.05.0 4.2.01 .0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman	Kota Blitar	12 Laporan	7,072,500.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	5,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
1.05.0 4.2.01 .0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Blitar	12 Dokumen	8,566,700.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	7,000,000.00
1.05.0 4.2.01 .0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kota Blitar	12 Orang	92,795,300.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Orang	39,634,089.00
1.05.0 4.2.01 .0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kota Blitar	10 Unit	24,566,542.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit	15,000,000.00
1.05.0 4.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi		100 %	82,497,500.00			100 %	49,000,000.00
1.05.0	Pendataan Sarana	Jumlah Dokumen yang	Kota	1	73,441,800.00	DANA		1	40,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2.02.0001	Prasarana Proteksi Kebakaran	Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Blitar	Dokumen		ALOKASI UMUM (DAU)		Dokumen	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Blitar	1 Dokumen	9,055,700.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	9,000,000.00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemenuhan relawan kebakaran sesuai standar		100 %	66,022,700.00			20 %	60,000,000.00
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kota Blitar	140 Orang	20,822,100.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		140 Orang	20,000,000.00
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran	Kota Blitar	21 Desa/Kelurahan	45,200,600.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21 Desa/Kelurahan	40,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya							
	JUMLAH				12.600.571.834,00				11.227.060.500,00

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 difokuskan pada :

- a. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain terkait penanganan PMKS;
- b. Pemberian sosialisasi / pemahaman kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat;
- c. Pengoptimalan layanan pengaduan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengintegrasian patroli gabungan dengan instansi terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Penyusunan rencana penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020;
- f. Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat pemadam kebakaran;
- g. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standarisasi Permendagri No 122 Tahun 2018;
- h. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- i. Peningkatan komitmen dari pimpinan level eselon III dan IV terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peningkatan pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana melalui sosialisasi;
- k. Pengoptimalan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan cara edukatif dan humanis;
- l. Penguatan pengumpulan data pendukung capaian SPM yang berupa pendataan jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal

sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia.

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 sebagai penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2025. Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 menyesuaikan anggaran yang tersedia.

2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2026;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dengan berpedoman kepada Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 ;
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2026.
- d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2026 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya

3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Renja Perangkat Daerah ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Blitar, Juli 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

RONNY YOZA PASALBESSY,S.Sos.,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP 196811041988091001